

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 *Stewardship Theory*

Stewardship Theory merupakan teori yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1989 yang didasarkan pada sifat yang dimiliki manusia seperti dapat dipercaya, jujur, bertanggung jawab dan berintegritas. Teori *stewardship* merupakan hubungan antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *steward* yang tercipta akibat sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggungjawab, integritas, dan kejujuran pada pihak lainnya. Pemerintah sebagai pihak yang lebih banyak memiliki informasi diharapkan dapat mewujudkan transparansi terhadap rakyat sesuai harapan dan kepercayaan yang telah diberikan rakyat (Frankoe et al., 2021).

Teori ini menjelaskan peran pemerintah sebagai suatu lembaga yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan sehingga pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dalam hal ini masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *steward*.

Pengaplikasian *Stewardship Theory* di dalam penelitian ini untuk memfokuskan sebuah asumsi bahwa perangkat desa sebagai

steward terhadap komitmennya, yang dapat mengembangkan akuntabilitas dengan mempunyai tingkat kepercayaan untuk hubungan *steward* dan *principal*. Teori ini juga berfokus pada asumsi mengenai perangkat desa berminat menata dana desa dengan baik untuk kepentingan khalayak desa sebagai *principal*, sehingga partisipasi maupun keyakinan masyarakat dapat menjadikan motivasi dalam menumbuhkan sebuah keakuntabilitan (Syaputri & Sagala, 2025).

2.1.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban dan penjelasan mengenai kinerja serta tindakan yang diambil oleh seorang pemegang amanah dalam pengelolaan dana. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mengacu pada tanggung jawab yang melekat pada individu maupun pemimpin organisasi desa untuk menyerahkan laporan, penjelasan, serta pertanggung jawaban atas segala keputusan dan kegiatan yang diambil dalam pengelolaan dana desa, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, berujung pada pelaporan keuangan (Syaputri & Sagala, 2025).

Secara umum akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Eman et al., 2022).

Pertanggungjawaban keputusan keuangan juga merupakan aspek penting, diukur dengan sejauh mana pemerintah desa terlibat secara aktif dalam menyampaikan dan menjelaskan keputusan keuangan kepada masyarakat. Indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa meliputi:

- a. Kejujuran dan Keterbukaan Informasi
- b. Kepatuhan dalam Pelaporan
- c. Kesesuaian Prosedur
- d. Kecukupan Informasi
- e. Ketepatan Penyampaian Laporan

2.1.3 Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

Komitmen organisasi akan terjadi ketika para aparat menunjukkan kepercayaan dan dukungan terhadap misi dan nilai-nilai organisasi, sehinggaterlihat dari sikap dan perilaku yang ditunjukkannya. Komitmen organisasi dapat menunjukkan sejauh mana perangkat desa memihak dan mempertahankan keanggotaan dalam administrasi desa untuk mencapai tujuan dan nilai yang tepat (Matani, 2020).

Hal ini mencakup motivasi yang kuat untukmengejar tujuan organisasi dan komitmen untuk terlibat dalam jangka panjang dengan organisasi. Individu dengan rasa komitmen organisasi yang kuat memperlihatkan persentase pertanggungjawabam yang tinggi terhadap tugas-tugas yang diembannya dan lebih mungkin

untuk memberikan layanan yang luar biasa kepada publik. Untuk menumbuhkan loyalitas karyawan secara efektif dan mendorong kinerja yang optimal terhadap tujuan organisasi, sangat penting untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap organisasi.

Komitmen organisasi merupakan sikap kesetiaan untuk organisasi, yaitu tetap bertahan dalam organisasi, mengupayakan pencapaian organisasi dan tidak berniat untuk berpisah dari organisasi dengan kondisi apapun. secara umum loyalitas merupakan aspek krusial bagi setiap individu dalam sebuah lembaga, karena dengan adanya rasa loyal tersebut, individu cenderung mengutamakan pencapaian tujuan lembaga dan menghindari tindakan yang dapat merugikan organisasi.

Tingkat keyakinan dan penerimaan seseorang terhadap tujuan organisasi, serta keinginannya untuk tetap menjadi bagian dari lembaga tersebut, akan meningkat apabila individu tersebut merasa puas dengan pekerjaan yang dijalankannya. Kepuasan kerja ini pada akhirnya berdampak pada meningkatnya komitmen terhadap organisasi atau Lembaga (Wardani et al., 2025). Komitmen organisasi berarti hubungan dari semua anggota organisasi yang terlibat aktif yang terdiri dari kepercayaan serta memiliki tujuan yang sama yang mencerminkan loyalitas dan dedikasi untuk kepentingan Bersama (Syaputri & Sagala, 2025).

2.1.4 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan keikutsertaan warga saat fase identifikasi permasalahan serta kapasitas yang dimiliki oleh warga memilih serta mencari solusi dalam penyelesaian suatu hal, dan melakukan segala upaya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada serta mengikuti evaluasi perubahan yang ada. Partisipasi masyarakat diartikan sebagai seseorang, suatu kelompok, atau masyarakat yang ikut serta dalam kontribusi atau memberikan sumbangan agar menunjang berhasilnya program dalam berbagai partisipasi (Wardani et al., 2025).

Semakin tinggi partisipasi, maka semakin tinggi jumlah individu yang ikut terlibat di dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi keterlibatan individu tersebut maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan, dan pembangunan akan menjadi semakin baik kedepannya (Fajri et al., 2021).

2.1.5 Whistleblowing System

Whistleblowing System adalah proses pengaduan atau pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan atau standar,

kode etik dan kebijakan serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi (Khoirunnisa, 2021).

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) menjelaskan bahwa *whistleblowing system* sebagai wadah untuk mengungkap tindakan pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan dan melanggar moral ataupun perilaku yang memberikan kerugian suatu organisasi, yang diperbuat oleh anggota organisasi ataupun pemangku jabatan organisasi yang dapat melakukan tindakan tersebut. Pengungkapan *whistleblowing system* juga dilakukan dengan rahasia. Pelaporan tindakan tersebut juga harus dengan niat yang baik dan bukan atas keinginan serta keluh kesah pribadi mengenai kebijakan suatu organisasi (Wardani et al., 2025).

Whistleblowing System juga berperan sebagai mekanisme pengawasan yang dapat mencegah individu melakukan tindakan tidak etis. Individu saling memantau, sehingga menurunkan niat untuk melakukan kecurangan karena meningkatnya risiko dilaporkan. Agar *whistleblowing system* efektif, komitmen organisasi dalam membangun lingkungan yang etis serta pemahaman akan pentingnya *whistleblowing system* sebagai alat etis sangat dibutuhkan (Suasri et al., 2025).

2.2 Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian - penelitian terdahulu, dengan tujuan untuk memperkuat hasil penelitian dan membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Berikut dibawah ini penelitian terdahulu yang relevan antara lain:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(Sholikhah et al., 2022)	Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Studi Empiris Pada Desa Se-Kabupaten Jepara	Variabel Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Variabel Partisipasi Masyarakat, <i>Whistleblowing System</i> dan Objek Penelitian yaitu Desa Se-Kabupaten Tegal	Komitmen organisasi pemerintah desa secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa se-Kabupaten Jepara. Sedangkan sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa se-Kabupaten Jepara.
(Rohmah et al., 2025)	Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat Dan Penerapan Sistem Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas	Variabel Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Variabel <i>Whistleblowing System</i> dan Objek Penelitian yaitu Desa Se-Kabupaten Tegal	Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Penerapan Sistem Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh terhadap

Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa			akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.
(Agastya & Windika, 2025)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Ubud	Variabel Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Variabel Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, <i>Whistleblowing System</i> dan Objek Penelitian yaitu Desa Se-Kabupaten Tegal	Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sel-kecamatan Ubud dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.
(Saputri et al., 2022)	Pengaruh Akuntabilitas, Komitmen Perangkat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Besuki	Variabel Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat	Variabel Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, <i>Whistleblowing System</i> dan Objek Penelitian yaitu Desa Se-Kabupaten Tegal	Variabel akuntabilitas komitmen perangkat desa dan partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Dan secara simultan variabel akuntabilitas, komitmen perangkat desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.
(Wardani et al., 2025)	Pengaruh Komitmen Organisasi Perangkat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan	Variabel Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, <i>Whistleblowing System</i>		1. Komitmen/keterikatan organisasi tidak memiliki pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. 2. Partisipasi masyarakat berpengaruh

Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	<i>Whistleblowing System</i> Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Seluruh Kelurahan Di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal)			Positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. 3. <i>Whistleblowing system</i> tidak dapat memoderasi komitmen organisasi perangkat Desa. 4. <i>Whistleblowing system</i> memoderasi pengaruh positif partisipasi masyarakat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.
(Suasri et al., 2025)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, <i>Whistleblowing System</i> terhadap Pencegahan Fraud dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi	Variabel <i>Whistleblowing System</i>	Variabel Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Objek Penelitian yaitu Desa Se-Kabupaten Tegal	1. sistem pengendalian internal mempunyai dampak signifikan pada upaya pencegahan fraud. 2. sistem pengendalian internal mempunyai dampak signifikan pada upaya pencegahan fraud. 3. moralitas individu terbukti mempunyai

Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(Fajri et al., 2021)	Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Variabel Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Variabel Komitmen organisasi Pemerintah Desa, <i>Whistleblowing System</i> dan Objek Penelitian yaitu Desa Se-Kabupaten Tegal	peran menjadi variabel moderasi yang memperkuat hubungan dari sistem pengendalian internal dan pencegahan fraud. 4. moralitas individu tidak berfungsi menjadi variabel moderasi dalam hubungan antara sistem <i>whistleblowing system</i> dan pencegahan fraud. Hasil dari penelitian ini adalah Pemahaman regulasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan regulasi mampu memberikan kontribusi secara nyata dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa dengan baik. Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya semakin tinggi tingkat pemahaman regulasi aparat desa, maka

Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(Syaputri & Sagala, 2025)	Pengaruh Komitmen Organisasi Perangkat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan <i>Whistleblowing</i> Sebagai Variabel Moderasi Pada Desa Di Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang	Variabel Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan <i>Whistleblowing System</i>	Variabel Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Objek Penelitian yaitu Desa Se-Kabupaten Tegal	pengelolaan dana desa semakin akuntabel. 1. Komitmen Organisasi Perangkat Desa dan Partisipasi Masyarakat merupakan variabel yang berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa di Kecamatan Labuhan Deli. 2. <i>Whistleblowing System</i> memperlemah hubungan Komitmen Organisasi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
(Pribadi et al., 2025)	Pengaruh Komitmen Organisasi, Transparansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderasi	Variabel Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat	Variabel <i>Whistleblowing System</i> dan Objek Penelitian yaitu Desa Se-Kabupaten Tegal	Ditemukan adanya korelasi yang kuat antara komitmen organisasi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. tumbuh. Selain itu, transparansi sangat mempengaruhi bagaimana dana desa dikelola. Disisi lain pemanfaatan teknologi tidak

Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(Bilung et al., 2023)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau	Variabel Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Variabel <i>Whistleblowing System</i> dan Objek Penelitian yaitu Desa Se-Kabupaten Tegal	berpengaruh secara signifikan, tidak ada efek moderasi atau memperkuat dari partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan komitmen organisasi, transparansi, dan penggunaan teknologi. Secara parsial Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Secara simultan Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Sumber : Diolah Untuk Penelitian (2026)

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Akuntabilitas didukung dengan adanya hubungan yang terjalin dari suatu organisasi, sehingga adanya rasa tanggungjawab yang dilaksanakan anggota untuk meningkatkan akuntabilitas. Akuntabilitas dapat dipercayakan kepada perangkat desa, yang dimana dibutuhkan komitmen yang tinggi dari organisasi untuk mewujudkan sebuah pelayanan yang baik untuk masyarakat dalam meraih pengelolaan dana secara efektif, hingga dengan tingginya komitmen organisasi ini para anggota dapat berlaku dengan waspada dan meneruskan hasil positif untuk desa.

Pernyataan ini terhubung dengan penelitian Sarbunan & Posi, (2021) yang mengungkapkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh komitmen organisasi perangkat desa. Pada Penelitian Sholikhah et al., (2022) menyatakan komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan harapan bahwa adanya komitmen organisasi pemerintah desa aparatur desa dapat menjalankan pengelolaan keuangan desa sehingga mampu menjalankan program kegiatan

dengan baik. Berdasarkan kajian teori *Stewardship* dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini, yaitu:

H₁ : Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2.3.2 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Akuntabilitas dana desa didukung dengan hubungan yang terjalin dengan masyarakat, sehingga dengan adanya keikutsertaan masyarakat dalam prosedur perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan dapat memberikan peran sebuah masyarakat sebagai principal dalam mengawasi perangkat desa sebagai *steward*. Partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan mengingat kewaspadaan pengelolaan dana desa yang sensitif terhadap pelanggaran. Masyarakat sebagai principal akan mendorong terjadinya pertukaran informasi dengan aparatur desa .

Dalam penelitian ini terhubung dengan (Rachman 2023) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pada Penelitian Pande Putu Yogi, (2025) Menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh Positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa keterlibatan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah, potensi yang dimiliki masyarakat, mengambil putusan mengenai alternatif solusi untuk penanganan masalah, melaksanakan

cara mengatasi masalah serta keterlibatan masyarakat dalam pengevaluasian perubahan yang terjadi berdasarkan asas. Berdasarkan kajian teori *Stewardship* dan penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₂ : Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2.3.3 *Whistleblowing System* memoderasi Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Penerapan *whistleblowing system* yang merupakan sebuah alat untuk memberitahukan sebuah pelanggaran yang dilakukan seseorang, untuk di selidiki dan sistem pelaporan ini baru memberikan bukti detail ataupun indikator yang benar-benar terjadi secara fakta (Yanti & Hidayah, 2023).

Whistleblowing System memperkuat hubungan pengaruh aspek komitmen organisasi perangkat desa terhadap akuntabilitas. Tingginya keterlibatan perangkat desa akan berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas pencatatan dan manajemen dana desa. Selain itu, penerapan *Whistleblowing System* yang efektif dapat menyampaikan informasi yang transparan kepada Masyarakat mengenai kinerja perangkat desa (Wardani et al., 2025). Kerja sama antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat sangat penting untuk mencegah korupsi, yang dapat dilakukan melalui tindakan nyata

yang dikenal dengan istilah *whistleblowing system* (Syaputri & Sagala, 2025).

Dalam penelitian Wardani et al., (2021) menyatakan bahwa Komitmen Organisasi Pemerintah Desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan *whistleblowing system* sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hipotesis, *whistleblowing system* dapat memperkuat pengaruh komitmen organisasi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan kajian teori *stewardship* dan penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian ini ialah:

H₃ : *Whistleblowing System* memoderasi Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2.3.4 *Whistleblowing System* memoderasi Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Penerapan *Whistleblowing System* adalah pengungkapan sebuah informasi mengenai perlakuan pelanggaran dalam organisasi yang diperbuat individu yang berpengaruh kepada kerugian negara termasuk masyarakat itu sendiri (Putri et al., 2024). *Whistleblowing System* dapat menjadi mekanisme pengawasan tambahan dalam meningkatkan pemerintahan desa yang akuntabel, dengan fokus

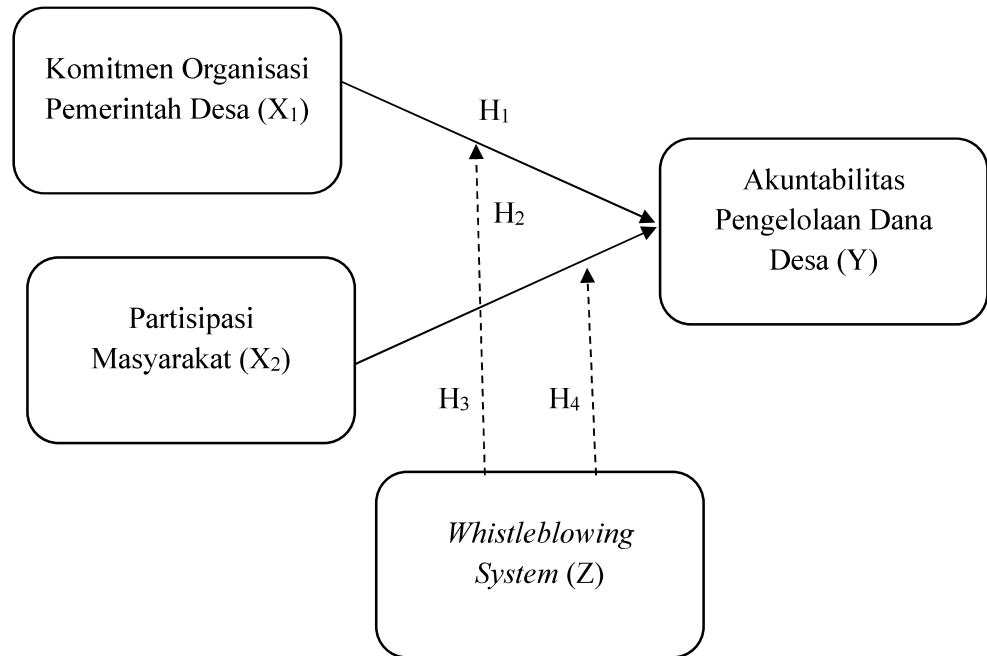
adanya partisipasi masyarakat untuk terlibat langsung dan menyediakan saluran untuk mengungkapkan penyimpangan.

Whistleblowing System dalam memperkuat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang dimana seseorang dapat menggunakan metode *whistleblowing system* untuk memberitahukan individu tentang penipuan yang dilakukan para petinggi. Agar pelanggar yang dilaporkan dapat ditelusuri atau diselidiki lebih lanjut, pelapor dalam sistem pelaporan diwajibkan untuk menyertakan bukti, rincian, atau indikator yang meyakinkan bahwa peristiwa tersebut benar - benar terjadi (Tiyas et al., 2024).

Dalam penelitian Wardani et al., (2021) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan *whistleblowing system* sebagai variabel moderasi. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur akademik, serta wawasan baru untuk penulis dan praktisi dalam mendorong efektivitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan kajian teori *stewardship* dan peneliti terdahulu maka hipotesis penelitian ini adalah :

H₄ : *Whistleblowing System* memoderasi Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2.4 Model Penelitian



Gambar 2. 1 Model Penelitian

Sumber : Peneliti (2026)